



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 TENTANG STANDAR KEBUTUHAN BARANG/JASA
DAN HONORARIUM UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015, standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan dimaksud hanya berlaku untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap pengaturan standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan, perlu mengubah standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan: Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 43/KPTS/KPU/TAHUN 2016 TENTANG STANDAR KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menetapkan perubahan standar kebutuhan barang dan jasa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan perubahan standar kebutuhan barang dan jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,


Nur Syarifah



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
 43/KPTS/KPU/TAHUN 2016 TENTANG STANDAR KEBUTUHAN
 BARANG/JASA DAN HONORARIUM UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
 DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

STANDAR KEBUTUHAN BARANG DAN JASA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
		UNIT	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
I.	TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN					
1.	Perencanaan Program dan Anggaran					Sesuai Tahapan
a.	Penyusunan rencana kebutuhan anggaran pemilihan	paket	x Rp	
b.	Pembahasan dengan TAPD dan DPRD	paket	x Rp	
c.	Pengelolaan Program dan Revisi Anggaran	paket	x Rp	
2.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Revisi/Pengesahan Anggaran Hibah Pemilihan	paket	x Rp	Sesuai Tahapan
3.	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan					Sesuai Tahapan
a.	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan)	paket	x Rp	
b.	Rapat Penyusunan Regulasi	paket	x Rp	
4.	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis					Sesuai Tahapan
a.	Sosialisasi/Penyuluhan	paket	x Rp	
b.	Bimbingan Teknis	paket	x Rp	
5.	Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP (termasuk pembubarannya)					Sesuai Tahapan
a.	Pembentukan dan Pelantikan PPK	paket	x Rp	
b.	Pembentukan dan Pelantikan PPS	paket	x Rp	
c.	Pembentukan dan Pelantikan KPPS	paket	x Rp	
d.	Pembentukan PPDP	paket	x Rp	
e.	Bimbingan Teknis PPK	paket	x Rp	
f.	Bimbingan Teknis PPS	paket	x Rp	
g.	Bimbingan Teknis KPPS	paket	x Rp	
h.	Bimbingan Teknis PPDP	paket	x Rp	
6.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih					Sesuai Tahapan
a.	Penyusunan daftar pemilih	paket	x Rp	
b.	Pemutakhiran data pemilih	paket	x Rp	
c.	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPS	paket	x Rp	
d.	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPT	paket	x Rp	
e.	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPTB	paket	x Rp	
7.	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan					Sesuai Tahapan
a.	KPU Provinsi/KIP Aceh	Prov	x	paket	x Rp.
b.	KPU/KIP Kabupaten/Kota	Kab/Kota	x	paket	x Rp.
c.	PPK	Kec	x	paket	x Rp.
d.	PPS	Desa	x	paket	x Rp.
8.	Pencalonan					Sesuai Tahapan
a.	Penerimaan dan Penelitian Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.	paket	x Rp	
b.	Pengumuman Pendaftaran dan Pelaksanaan Pendaftaran.	paket	x Rp	
c.	Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon	paket	x Rp	
d.	Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	paket	x Rp	
e.	Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan.	paket	x Rp	
f.	Pengumuman Pasangan Calon Peserta Pemilihan.	paket	x Rp	

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
		UNIT	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
9.	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye					Sesuai Tahapan
	a. Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon paket	x Rp paket	Rp....	
	b. Bahan Kampanye paket	x Rp paket	Rp....	
	c. Alat Peraga (termasuk biaya pemasangan, perawatan dan/atau bencana alam) paket	x Rp paket	Rp....	
	d. Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media On-line paket	x Rp paket	Rp....	
10.	Laporan Audit Dana Kampanye					Sesuai Tahapan
	a. Dokumen audit dana kampanye paket	x Rp paket	Rp....	
	b. Akuntan Publik paket	x Rp paket	Rp....	
	c. Sosialisasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye paket	x Rp paket	Rp....	
11.	Proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara					Sesuai Tahapan
	a. Persiapan Penghitungan/Rekapitulasi Kab/Kota x hari	x orang	x Rp. OB	Rp....
	b. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. paket x kali		x Rp. paket	Rp....
	c. Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara paket x kali		x Rp. paket	Rp....
12.	Advokasi Hukum Prov/ Kab/Kota	x 1 paket	x Rp. paket	Rp....
	a. Dokumen advokasi hukum paket	x Rp paket	Rp....	
	b. Pengadaan jasa konsultan/pengacara paket	x Rp paket	Rp....	
13.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara					Sesuai Tahapan
	a. Pengadaan Barang Cetak/Penggandaan					
	1) Proses pengadaan barang dan jasa paket x kali		x Rp. paket	Rp....
	2) Cetak surat suara	(..... DPT x 102.5%)	+ 2000 lembar	x Rp. lembar	Rp....
	3) Penggandaan Formulir					
	- Formulir A KWK TPS	x lembar	x Rp. paket	Rp....
	- Formulir B KWK paket	x lembar	x Rp. paket	Rp....
	- Formulir C KWK TPS	x lembar	x Rp. paket	Rp....
	- Formulir D KWK PPS	x lembar	x Rp. paket	Rp....
	- Formulir DAA KWK PPK	x lembar	x Rp. paket	Rp....
	- Formulir DA KWK PPK	x lembar	x Rp. paket	Rp....
	- Formulir DB KWK Kab/Kota	x lembar	x Rp. paket	Rp....
	- Formulir DC KWK Prov	x lembar	x Rp. paket	Rp....
	- Stiker Pemutakhiran data pemilih Kab/Kota	x lembar	x Rp. paket	Rp....
	4) Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan					
	- Provinsi Prov	x eks	x Rp. paket	Rp....
	- Kabupaten/Kota Kab/Kota	x eks	x Rp. paket	Rp....
	- PPK PPK	x eks	x Rp. paket	Rp....
	- PPS PPS	x eks	x Rp. paket	Rp....
	- KPPS/TPS TPS	x eks	x Rp. paket	Rp....
	- PPDP/Pantarliih TPS	x eks	x Rp. paket	Rp....
	b. Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.					
	1) Kotak Suara buah	x TPS	x Rp. buah	Rp....
	2) Bilik Pemungutan Suara buah	x TPS	x Rp. buah	Rp....
	3) Tinta sidik jari buah	x TPS	x Rp. buah	Rp....
	4) Segel					
	- Tingkat Prov	(... keping	x Prov)	x Rp. keping	Rp....
	- Tingkat Kab/Kota	((.... keping x Kab/Kota + (... keping	x TPS))	x Rp. keping	Rp....
	- Tingkat PPK	((.... keping x PPK) + (... keping	x TPS))	x Rp. keping	Rp....
	- Tingkat KPPS	(... keping	x TPS)	x Rp. keping	Rp....
	5) Sampul (Kubus dan Biasa)					
	Tingkat TPS					
	- Sampul Model C (biasa) buah	x TPS	x Rp. buah	Rp....
	- Sampul Surat Suara Rusak (Biasa) buah	x TPS	x Rp. buah	Rp....
	- Sampul Surat Suara Tidak Terpakai (Kubus) buah	x TPS	x Rp. buah	Rp....
	- Sampul Surat Suara Tidak Sah (Biasa) buah	x TPS	x Rp. buah	Rp....
	- Sampul Surat Suara Sah (Kubus) buah	x TPS	x Rp. buah	Rp....
	- Sampul Anak Kunci buah	x TPS	x Rp. buah	Rp....
	- Sampul DPT dan DPTb buah	x TPS	x Rp. buah	Rp....
	Tingkat PPS					
	- Sampul di PPS buah	x TPS	x Rp. buah	Rp....

NO	URAIAN						VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
							UNIT	SATUAN			
1	2						3	4	5	6	7
	Tingkat PPK										
	- Sampul DA (Biasa) buah x TPS x Rp.						buah	Rp....		
	- Sampul Anak Kunci buah x TPS x Rp.						buah	Rp....		
	- Sampul Kubus buah x TPS x Rp.						buah	Rp....		
	Tingkat Kabupaten/Kota										
	- Sampul Model DB (Biasa) buah x TPS x Rp.						buah	Rp....		
	- Sampul Surat Suara (Kubus) buah x TPS x Rp.						buah	Rp....		
	6) Bantalan dan Alat Pencoblos set x TPS x Rp.						set	Rp....		
	7) Tanda pengenal/tanda Pengusul/Badge Pantarlih/PPDP x lembar x PPD x Rp.						lembar	Rp....		
	8) Tanda pengenal (KPPS + PAM + saksi) x lembar x TPS x Rp.						lembar	Rp....		
	9) Karet pengikat buah x TPS x Rp.						buah	Rp....		
	10) Lem perekat ((.... botol x PPK) + (... botol x TPS)) x Rp.						botol	Rp....		
	11) Kantong plastik ((.... buah x PPK) + (... buah x TPS)) x Rp.						buah	Rp....		
	12) Ballpoint ((.... buah x PPK) + (... buah x TPS)) x Rp.						buah	Rp....		
	13) Gembok ((.... buah x PPK) + (... buah x TPS)) x Rp.						buah	Rp....		
	14) Spidol besar ((.... buah x PPK) + (... buah x TPS)) x Rp.						buah	Rp....		
	15) Spidol kecil ((.... buah x PPK) + (... buah x TPS)) x Rp.						buah	Rp....		
	16) Sticker nomor Kotak Suara lembar x TPS x Rp.						lembar	Rp....		
	17) Alat bantu tuna netra lembar x TPS x Rp.						lembar	Rp....		
	18) Daftar pasangan calon lembar x TPS x Rp.						lembar	Rp....		
	19) Hologram keping x TPS x Rp.						keping	Rp....		
	20) Sarana/papan pengumuman buah x TPS x Rp.						buah	Rp....		
	21) Salinan DPT (3 + saksi) x lembar x TPS x Rp.						lembar	Rp....		
	22) Kotak suara untuk BA ((1 buah x Kab/Kota + (3 buah x PPK)) x Rp.						buah	Rp....		
	23) Stiker label Kotak untuk BA ((1 buah x Kab/Kota + (3 buah x PPK)) x Rp.						buah	Rp....		
	24) Sticker Kotak Suara Hasil Rekapitulasi lembar x TPS x Rp.						lembar	Rp....		
	25) Sticker Kotak Suara C, C1 dan Lampiran C1 lembar x TPS x Rp.						lembar	Rp....		
	25) Sticker Kotak Suara Daftar Pemilih lembar x TPS x Rp.						lembar	Rp....		
	26) Stampel Surat Suara buah x TPS x Rp.						lembar	Rp....		
	c. Distribusi - PP (termasuk bongkar muat dan komponen pendukung lainnya)										
	1) Dari Provinsi ke Kabupaten/Kota rate/PP x Kab/Kota x Rp.						PP	Rp....		
	2) Dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan/sebutan lainnya (PPK/PPD) rate/PP x PPK x Rp.						PP	Rp....		
	3) Dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan/sebutan lainnya (PPS) rate/PP x PPS x Rp.						PP	Rp....		
	4) Dari Desa/Kelurahan ke KPPS (TPS) rate/PP x TPS x Rp.						PP	Rp....		
	d. Honorarium Pengelola										
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu orang x bulan x Rp.						OB	Rp....		
	2) Pokja ULP orang x bulan x Rp.						OB	Rp....		
	3) Pejabat Pengadaan orang x bulan x Rp.						OB	Rp....		
	4) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan orang x bulan x Rp.						OB	Rp....		
	5) Sekretariat Pokja ULP orang x bulan x Rp.						OB	Rp....		
	6) Tenaga Profesional orang x bulan x Rp.						OB	Rp....		
	7) Tenaga Pendukung orang x bulan x Rp.						OB	Rp....		
	8) Tenaga Operator Komputer orang x bulan x Rp.						OB	Rp....		
14.	Pelatihan/Bimbingan Teknis dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS										Sesuai Tahapan
	a. Pelatihan/Bimtek Kab/Kota x Keg x Rp.						Keg	Rp....		
	b. Biaya Panitia Kab/Kota x Keg x Rp.						Keg	Rp....		
15.	Rapat Kerja										
	a. Rapat Kerja										
	- Dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota (di Kabupaten/Kota/di Provinsi) orang x kali x Rp.						OK	Rp....		
	- Dengan PPK (di Kecamatan atau di Kabupaten/Kota) orang x kali x Rp.						OK	Rp....		
	- Dengan PPS (di Kecamatan) orang x kali x Rp.						OK	Rp....		
	- Dengan Pihak lain orang x kali x Rp.						OK	Rp....		
	b. Rapat Kerja Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan orang x kali x Rp.						OK	Rp....		
16.	Perjalanan Dinas										
	a. Dalam Rangka Konsultasi, Rapat Kerja, Bimbingan Teknis ke Pusat orang x kali x Rp.						OK	Rp....		
	b. Dalam Rangka Rapat Kerja/Sosialisasi/Bimbingan Teknis :										
	- Dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota (di Kab/Kota atau di Provinsi) orang x kali x Rp.						OK	Rp....		
	- Dengan PPK (di Kecamatan atau di Kabupaten/Kota) orang x kali x Rp.						OK	Rp....		
	- Dengan PPS (di Kecamatan) orang x kali x Rp.						OK	Rp....		
	c. Monitoring dan Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan di PPK, PPS dan KPPS/TPS orang x kali x Rp.						OK	Rp....		
	d. Perjalanan Dinas Lainnya orang x kali x Rp.						OK	Rp....		

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
		UNIT	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
17.	Evaluasi dan Pelaporan					Sesuai Tahapan
	a. Penyusunan Laporan Tahapan Pemilihan	paket x Rp.	paket Rp....
	b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Pemilihan	paket x Rp.	paket Rp....
II.	OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
18.	Pemeliharaan					
	a. Kantor/Inventaris	paket x	bulan x Rp.	PB Rp....
	b. Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	paket x	bulan x Rp.	PB Rp....
19.	Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2					
	a. Roda 4	unit x	bulan x Rp.	KB Rp....
	b. Roda 2	unit x	bulan x Rp.	KB Rp....
20.	Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	a. KPU Provinsi/KIP Aceh					
	1) Alat Tulis Kantor (ATK)	bulan x Rp.	bulan Rp....
	2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet	bulan x Rp.	bulan Rp....
	3) Sidang/rapat biasa	bulan x Rp.	bulan Rp....
	4) Pengamanan Kantor	bulan x Rp.	bulan Rp....
	5) Penyusunan dokumen hasil evaluasi dan pelaporan	Prov/Kakot x	bulan x Rp.	PB Rp....
	6) Dokumentasi/Publikasi	Prov/Kakot x	bulan x Rp.	PB Rp....
	b. KPU/KIP Kabupaten/Kota					
	1) Alat Tulis Kantor (ATK)	bulan x Rp.	bulan Rp....
	2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet	bulan x Rp.	bulan Rp....
	3) Sidang/rapat biasa	bulan x Rp.	bulan Rp....
	4) Pengamanan kantor	bulan x Rp.	bulan Rp....
	5) Penyusunan dokumen hasil evaluasi dan pelaporan	Kab/Kota x	bulan x Rp.	PB Rp....
	6) Dokumentasi/Publikasi	Kab/Kota x	bulan x Rp.	PB Rp....
	c. PPK					
	1) Alat Tulis Kantor (ATK)	PPK x	bulan x Rp.	PB Rp....
	2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet	PPK x	bulan x Rp.	PB Rp....
	3) Sidang/rapat biasa	PPK x	bulan x Rp.	PB Rp....
	4) Sewa gedung kantor *)	PPK x	bulan x Rp.	PB Rp....
	5) Sewa komputer dan printer	PPK x	bulan x Rp.	PB Rp....
	6) Perjalanan Dinas/Transport (rapat kerja, pelantikan, dan lain-lain)	PPK x	bulan x Rp.	PB Rp....
	d. PPS					
	1) Alat Tulis Kantor (ATK)	Ds/Kel x	bulan x Rp.	PB Rp....
	2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet	Ds/Kel x	bulan x Rp.	PB Rp....
	3) Sidang/Rapat Biasa	Ds/Kel x	bulan x Rp.	PB Rp....
	4) Sewa Gedung Kantor*)	Ds/Kel x	bulan x Rp.	PB Rp....
	5) Perjalanan Dinas/Transport (rapat kerja, pelantikan, dan lain-lain)	Ds/Kel x	bulan x Rp.	PB Rp....
	e. KPPS					
	1) Alat Tulis Kantor (ATK)	TPS x	TPS x Rp.	PB Rp....
	2) Konsumsi (makan dan snack)	TPS x	orang x Rp.	PB Rp....
	3) Biaya Pembuatan TPS (Tenda, Meja, Kursi, <i>sound system</i> , dan lain-lain)	TPS x	orang x Rp.	PB Rp....

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
		UNIT	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
21.	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya					
	a. Kendaraan operasional roda 4 unit	x bulan	x Rp. unit	Rp....
	b. Kendaraan operasional roda 2 unit	x bulan	x Rp. unit	Rp....
	c. Kendaraan lainnya (transport logistik) unit	x kali	x Rp. kali	Rp....
	d. Kendaraan operasional roda 2 untuk PPK PPK x unit	x bulan	x Rp. unit	Rp....
22.	Pengelolaan Logistik Pemilihan					
	a. Sewa gudang	 paket	x Rp. paket	Rp....
	b. Pengamanan gudang orang x Kab/Kota	x bulan	x Rp. OB	Rp....
	c. Pengawasan proses logistik (surat suara, dan lain-lain)	 paket	x Rp. paket	Rp....
	d. Sortir dan lipat surat suara	 lembarSS	x Rp. lembar	Rp....
	e. Pengesetan formulir	 paket	x Rp. paket	Rp....
	f. Penyiapan kotak dan bilik suara					
	- Persiapan pengelolaan logistik pra Pemilihan (pengepakan)	(... buah	x TPS)	x Rp. buah	Rp....
	- Kotak suara (termasuk mur dan baut jika bahan aluminium)	(... buah	x TPS)	x Rp. buah	Rp....
	- Bilik pemungutan suara (termasuk mur dan baut jika bahan aluminium)	(... buah	x TPS)	x Rp. buah	Rp....
23.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	 paket	x Rp. paket	Rp....
23.	Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Lanjutan, dan Pemilihan Susulan	 paket	x Rp. paket	Rp....
	JUMLAH					

Keterangan:
 Sewa gedung kantor, apabila Pemerintah Daerah tidak menyediakan gedung/kantor untuk PPK dan PPS.
 Penyediaan gedung kantor bagi PPK dan PPS oleh Pemerintah Daerah maupun sewa gedung kantor sudah termasuk dengan kelengkapan perkantoran (meja, kursi, kelengkapan kerja, dll)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Hukum,


 Nur Syarifah



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
 43/KPTS/KPU/TAHUN 2016 TENTANG STANDAR KEBUTUHAN
 BARANG/JASA DAN HONORARIUM UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
 DAN/ATAU WALKOTA DAN WAKIL WALKOTA

STANDAR KEBUTUHAN BARANG DAN JASA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALKOTA DAN WAKIL WALKOTA
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
		UNIF	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
I.	TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN					
1.	Perencanaan Program dan Anggaran					Sesuai Tahapan
a.	Penyusunan kebutuhan anggaran Pemilihan paket	x Rp paket	Rp....
b.	Pembahasan dengan TAPD dan DPRD paket	x Rp paket	Rp....
2.	Penyusunan, Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Revisi/Pengesahan Anggaran Hibah Pemilihan paket	x Rp paket	Rp....
3.	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan					Sesuai Tahapan
a.	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) paket	x Rp paket	Rp....
b.	Rapat Penyusunan Regulasi paket	x Rp paket	Rp....
4.	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis					Sesuai Tahapan
a.	Sosialisasi/Penyuluhan paket	x Rp paket	Rp....
b.	Bimbingan Teknis paket	x Rp paket	Rp....
5.	Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP					Sesuai Tahapan
a.	Pembentukan dan Pelantikan PPK paket	x Rp paket	Rp....
b.	Pembentukan dan Pelantikan PPS paket	x Rp paket	Rp....
c.	Pembentukan dan Pelantikan KPPS paket	x Rp paket	Rp....
d.	Pembentukan PPDP paket	x Rp paket	Rp....
e.	Bimbingan Teknis PPK paket	x Rp paket	Rp....
f.	Bimbingan Teknis PPS paket	x Rp paket	Rp....
g.	Bimbingan Teknis KPPS paket	x Rp paket	Rp....
h.	Bimbingan Teknis PPDP paket	x Rp paket	Rp....
6.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih					Sesuai Tahapan
a.	Penyusunan daftar pemilih paket	x Rp paket	Rp....
b.	Pemutakhiran data pemilih paket	x Rp paket	Rp....
c.	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPS paket	x Rp paket	Rp....
d.	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPT paket	x Rp paket	Rp....
e.	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPTB paket	x Rp paket	Rp....
7.	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan					Sesuai Tahapan
a.	KPU/KIP Kabupaten/Kota Kab/Kota	x paket	x Rp. paket	Rp....
b.	PPK Kec	x paket	x Rp. paket	Rp....
c.	PPS Desa	x paket	x Rp. paket	Rp....
8.	Pencalonan					Sesuai Tahapan
a.	Penerimaan dan Penelitian Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan. paket	x Rp paket	Rp....
b.	Pengumuman Pendaftaran dan Pelaksanaan Pendaftaran. paket	x Rp paket	Rp....
c.	Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon paket	x Rp paket	Rp....
d.	Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon paket	x Rp paket	Rp....
e.	Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan. paket	x Rp paket	Rp....
e.	Pengumuman Pasangan Calon Peserta Pemilihan. paket	x Rp paket	Rp....
9.	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye					Sesuai Tahapan
a.	Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon paket	x Rp paket	Rp....
b.	Bahan Kampanye paket	x Rp paket	Rp....

NO	URAIAN					VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	KET	
						UNIT	SATUAN				
1	2					3	4	5	6	7	
	c.	Alat Peraga (termasuk biaya pemasangan, perawatan dan/atau bencana alam) paket	x Rp	paket	Rp....		
	d.	Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik paket	x Rp	paket	Rp....		
10.	Laporan Audit Dana Kampanye									Sesuai Tahapan	
	a.	Dokumen audit dana kampanye paket	x Rp	paket	Rp....		
	b.	Akuntan Publik paket	x Rp	paket	Rp....		
	c.	Sosialisasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye paket	x Rp	paket	Rp....		
11.	Proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara									Sesuai Tahapan	
	a.	Persiapan Penghitungan/Rekapitulasi Kab/Kota	x hari	x orang	x Rp.	OB	Rp....		
	b.	Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara paket	x kali		x Rp.	paket	Rp....		
	c.	Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara paket	x kali		x Rp.	paket	Rp....		
12.	Advokasi Hukum				 Prov/ Kab/Kota	x 1 paket	x Rp.	paket	Rp....	Sesuai Tahapan
	a.	Dokumen advokasi hukum paket	x Rp	paket	Rp....		
	b.	Pengadaan jasa konsultan/pengacara paket	x Rp	paket	Rp....		
13.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara									Sesuai Tahapan	
	a.	Pengadaan Barang Cetak/Penggandaan									
	1)	Kegiatan pengadaan barang dan jasa paket	x kali		x Rp.	paket	Rp....		
	2)	Cetak surat suara	(..... DPT	x 102.5%)	+ 2000 lembar	x Rp.	lembar	Rp....		
	3)	Penggandaan Formulir									
	-	Formulir A KWK TPS	x lembar		x Rp.	paket	Rp....		
	-	Formulir B KWK paket	x lembar		x Rp.	paket	Rp....		
	-	Formulir C KWK TPS	x lembar		x Rp.	paket	Rp....		
	-	Formulir D KWK PPS	x lembar		x Rp.	paket	Rp....		
	-	Formulir DAA KWK PPK	x lembar		x Rp.	paket	Rp....		
	-	Formulir DA KWK PPK	x lembar		x Rp.	paket	Rp....		
	-	Formulir DB KWK Kab/Kota	x lembar		x Rp.	paket	Rp....		
	-	Formulir DC KWK Prov	x lembar		x Rp.	paket	Rp....		
	-	Stiker Pemutakhiran data pemilih Kab/Kota	x lembar		x Rp.	paket	Rp....		
	4)	Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan									
	-	Kabupaten/Kota Kab/Kota	x eks		x Rp.	paket	Rp....		
	-	PPK PPK	x eks		x Rp.	paket	Rp....		
	-	PPS PPS	x eks		x Rp.	paket	Rp....		
	-	KPPS/TPS TPS	x eks		x Rp.	paket	Rp....		
	-	PPDP TPS	x eks		x Rp.	paket	Rp....		
	b.	Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.									
	1)	Kotak Suara buah	x TPS		x Rp.	buah	Rp....		
	2)	Bilik Pemungutan Suara buah	x TPS		x Rp.	buah	Rp....		
	3)	Tinta sidik jari buah	x TPS		x Rp.	buah	Rp....		
	4)	Segel									
	-	Tingkat Kab/Kota	((.... keping x Kab/Kota)	+ (... keping x TPS))		x Rp.	keping	Rp....		
	-	Tingkat PPK	((.... keping x PPK)	+ (... keping x TPS))		x Rp.	keping	Rp....		
	-	Tingkat KPPS	(... keping x TPS)			x Rp.	keping	Rp....		
	5)	Sampul (Kubus dan Biasa)									
	-	Tingkat TPS									
	-	Sampul Model C (biasa) buah	x TPS		x Rp.	buah	Rp....		
	-	Sampul Surat Suara Rusak (Biasa) buah	x TPS		x Rp.	buah	Rp....		
	-	Sampul Surat Suara Tidak Terpakai (Kubus) buah	x TPS		x Rp.	buah	Rp....		
	-	Sampul Surat Suara Tidak Sah (Biasa) buah	x TPS		x Rp.	buah	Rp....		
	-	Sampul Surat Suara Sah (Kubus) buah	x TPS		x Rp.	buah	Rp....		
	-	Sampul Anak Kunci buah	x TPS		x Rp.	buah	Rp....		
	-	Sampul DPT dan DPTb buah	x TPS		x Rp.	buah	Rp....		
	-	Tingkat PPS									
	-	Sampul di PPS buah	x TPS		x Rp.	buah	Rp....		
	-	Tingkat PPK									
	-	Sampul DA (Biasa) buah	x TPS		x Rp.	buah	Rp....		
	-	Sampul Anak Kunci buah	x TPS		x Rp.	buah	Rp....		
	-	Sampul Kubus buah	x TPS		x Rp.	buah	Rp....		
	-	Tingkat Kabupaten/Kota									
	-	Sampul Model DB (Biasa) buah	x TPS		x Rp.	buah	Rp....		
	-	Sampul Surat Suara (Kubus) buah	x TPS		x Rp.	buah	Rp....		
	6)	Bantalan dan Alat Pencoblos set	x TPS		x Rp.	set	Rp....		
	7)	Tanda pengenalan/tanda Pengusul/Badge Pantarlih/PPDP	x lembar	x PPDP		x Rp.	lembar	Rp....		
	8)	Tanda pengenalan (KPPS + PAM + saksi)	x lembar	x TPS		x Rp.	lembar	Rp....		

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
		UNIT	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
	9) Karet pengikat buah	x TPS	x Rp.
	10) Lem perekat ((.... botol x PPK) + (... botol x TPS)) buah	x TPS)	x Rp.
	11) Kantong plastik ((.... buah x PPK) + (... buah x TPS)) buah	x TPS)	x Rp.
	12) Ballpoint ((.... buah x PPK) + (... buah x TPS)) buah	x TPS)	x Rp.
	13) Gembok ((.... buah x PPK) + (... buah x TPS)) buah	x TPS)	x Rp.
	14) Spidol besar ((.... buah x PPK) + (... buah x TPS)) buah	x TPS)	x Rp.
	15) Spidol kecil ((.... buah x PPK) + (... buah x TPS)) buah	x TPS)	x Rp.
	16) Sticker nomor Kotak Suara lembar	x TPS	x Rp.
	17) Alat bantu tuna netra lembar	x TPS	x Rp.
	18) Daftar pasangan calon lembar	x TPS	x Rp.
	19) Hologram keping	x TPS	x Rp.
	20) Sarana/papan pengumuman buah	x TPS	x Rp.
	21) Salinan DPT (3 + saksi)	x lembar	x TPS	x Rp.
	22) Kotak untuk BA Rekapitulasi ((1 buah x Kab/Kota) + (3 buah x PPK))	x lembar	x PPK))	x Rp.
	23) Stiker label Kotak untuk BA ((1 buah x Kab/Kota) + (3 buah x PPK))	x lembar	x PPK))	x Rp.
	24) Sticker Kotak Suara Hasil Rekapitulasi lembar	x TPS	x Rp.
	25) Sticker Kotak Suara C, C1 dan Lampiran C1 lembar	x TPS	x Rp.
	25) Sticker Kotak Suara Daftar Pemilih lembar	x TPS	x Rp.
	26) Stempel Surat Suara lembar	x TPS	x Rp.
c.	Distribusi - PP (termasuk bongkar muat dan komponen pendukung lainnya)					
	1) Dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan/sebutan lainnya (PPK/PPD) rate/PP	x PPK	x Rp.
	2) Dari Kecamatan Ke Desa/Kelurahan/sebutan lainnya (PPS) rate/PP	x PPS	x Rp.
	3) Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS) rate/PP	x TPS	x Rp.
d.	Honorarium Pengelola					
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu orang	x bulan	x Rp.
	2) Pokja ULP orang	x bulan	x Rp.
	3) Pejabat Pengadaan orang	x bulan	x Rp.
	4) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan orang	x bulan	x Rp.
	5) Sekretariat Pokja ULP orang	x bulan	x Rp.
	6) Tenaga Profesional orang	x bulan	x Rp.
	7) Tenaga Pendukung orang	x bulan	x Rp.
	8) Tenaga Operator Komputer orang	x bulan	x Rp.
14.	Pelatihan/Bimbingan Teknis dengan PPK/PPS/KPPS					Sesuai Tahapan
	a. Rapat kerja/pelatihan Kab/Kota	x Keg	x Rp.
	b. Biaya Panitia Kab/Kota	x Keg	x Rp.
15.	Rapat Kerja dan Supervisi					
	a. Rapat Kerja					
	- Dengan KPU Kabupaten/Kota (di Kabupaten/Kota atau di Provinsi) orang	x kali	x Rp.
	- Dengan PPK (di Kecamatan atau di Kabupaten/Kota) orang	x kali	x Rp.
	- Dengan PPS (di Kecamatan) orang	x kali	x Rp.
	- Dengan pihak lain orang	x kali	x Rp.
	b. Rapat Kerja Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan orang	x kali	x Rp.
16.	Perjalanan Dinas					
	a. Dalam Rangka Konsultasi, Rapat kerja, Bimbingan teknis ke Provinsi/Ph.... orang	x kali	x Rp.
	b. Dalam Rangka Rapat kerja/Sosialisasi/Bimbingan teknis :					
	- Dengan KPU Kabupaten/Kota (di Kabupaten/Kota) orang	x kali	x Rp.
	- Dengan PPK (di Kecamatan atau di Kabupaten/Kota) orang	x kali	x Rp.
	- Dengan PPS (di Kecamatan) orang	x kali	x Rp.
	c. Bimbingan Teknis, Supervisi dan Monitoring Persiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan. orang	x kali	x Rp.
	d. Perjalanan Dinas Lainnya orang	x kali	x Rp.
17.	Evaluasi dan Pelaporan					Sesuai Tahapan
	a. Penyusunan Laporan Tahapan Pemilihan paket	x Rp.
	b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Pemilihan paket	x Rp.
II.	OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
18.	Pemeliharaan					
	a. Kantor/Inventaris paket	x bulan	x Rp.
	b. Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 paket	x bulan	x Rp.
19.	Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2					
	a. Roda 4 unit	x bulan	x Rp.
	b. Roda 2 unit	x bulan	x Rp.

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
		UNIT	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
20.	Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	a. KPU Provinsi/KIP Aceh					
	1) Alat Tulis Kantor (ATK)	bulan	x Rp.
	2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet	bulan	x Rp.
	3) Sidang/Rapat Biasa	bulan	x Rp.
	4) Pengamanan Kantor	bulan	x Rp.
	5) Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi dan Pelaporan Kab/Kota	x bulan	x Rp.	PB Rp....
	6) Dokumentasi/Publikasi Kab/Kota	x bulan	x Rp.	PB Rp....
	b. KPU /KIP Kabupaten/Kota					
	1) Alat Tulis Kantor (ATK)	bulan	x Rp.
	2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet	bulan	x Rp.
	3) Sidang/Rapat Biasa	bulan	x Rp.
	4) Pengamanan Kantor	bulan	x Rp.
	5) Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi dan Pelaporan Kab/Kota	x bulan	x Rp.	PB Rp....
	6) Dokumentasi/Publikasi Kab/Kota	x bulan	x Rp.	PB Rp....
	c. PPK					
	1) Alat Tulis Kantor (ATK) PPK	x bulan	x Rp.	PB Rp....
	2) Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet PPK	x bulan	x Rp.	PB Rp....
	3) Sidang/Rapat Biasa PPK	x bulan	x Rp.	PB Rp....
	4) Sewa Gedung Kantor*) PPK	x bulan	x Rp.	PB Rp....
	5) Sewa Komputer dan printer PPK	x bulan	x Rp.	PB Rp....
	6) Perjalanan Dinas/Transport (Rapat kerja, Pelantikan, dan lain-lain) PPK	x bulan	x Rp.	PB Rp....
	d. PPS					
	1) Alat Tulis Kantor (ATK) Ds/Kel	x bulan	x Rp.	PB Rp....
	2) Listrik/ Genset/Telepon/Air/Internet Ds/Kel	x bulan	x Rp.	PB Rp....
	3) Sidang/Rapat Biasa Ds/Kel	x bulan	x Rp.	PB Rp....
	4) Sewa Gedung Kantor*) Ds/Kel	x bulan	x Rp.	PB Rp....
	5) Perjalanan Dinas/Transport (Rapat kerja, Pelantikan, dan lain-lain) Ds/Kel	x bulan	x Rp.	PB Rp....
	e. KPPS					
	1) Alat Tulis Kantor (ATK)	TPS	x Rp.	PB Rp....
	2) Konsumsi (makan dan snack)	TPS	x Rp.	PB Rp....
	3) Biaya Pembuatan TPS (Tenda, Meja, Kursi, sound system, dan lain-lain)	TPS	x Rp.	PB Rp....
21.	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya					
	a. Kendaraan Operasional Roda 4	unit	x Rp.	unit Rp....
	b. Kendaraan Operasional Roda 2	unit	x Rp.	unit Rp....
	c. Kendaraan Lainnya (transport logistik)	unit	x Rp.	kali Rp....
	d. Kendaraan Operasional Roda 2 untuk PPK PPK	x unit	x Rp.	unit Rp....
22.	Pengelolaan Logistik Pemilihan					
	a. Sewa gudang	orang	x Rp.	paket Rp....
	b. Pengamanan gudang	orang	x Rp.	OB Rp....
	c. Pengawasan proses logistik (surat suara, dan lain-lain)	paket	x Rp.	paket Rp....
	d. Sortir dan lipat Surat Suara	lembarSS	x Rp.	lembar Rp....
	e. Pengesetan Formulir	paket	x Rp.	paket Rp....
	f. Penyiapan kotak dan bilik suara					
	- Persiapan pengelolaan logistik pra Pemilihan (pengepakan)	(... buah	x TPS)	x Rp.	buah Rp....
	- Kotak Suara (termasuk mur dan baut jika bahan Alumunium)	(... buah	x TPS)	x Rp.	buah Rp....
	- Bilik pemungutan Suara (termasuk mur dan baut jika bahan Alumunium)	(... buah	x TPS)	x Rp.	buah Rp....
23.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	paket	x Rp.	paket Rp....
23.	Pemungutan Suara Ule ^{ng} , Pemilihan Lanjutan, dan Pemilihan Susulan	paket	x Rp.	paket Rp....
	JUMLAH				

Keterangan:

Sewa gedung kantor, apabila Pemerintah Daerah tidak menyediakan gedung/kantor untuk PPK dan PPS.

Penyediaan gedung kantor bagi PPK dan PPS oleh Pemerintah Daerah maupun sewa gedung kantor sudah termasuk dengan kelengkapan perkantoran (meja, kursi, kelengkapan kerja, dll)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Nur Syarifah

